

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran E (Akuntansi dan Pelaporan). Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, Maret 2019
PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. ARIANSYAH, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Maret 2019
PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. ARIANSYAH, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2018			REALISASI 2017
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	PENDAPATAN	310.000.000,00	223.353.000,00	72,05	312.242.500,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	310.000.000,00	223.353.000,00	72,05	312.242.500,00
3	Pendapatan Retribusi Daerah	310.000.000,00	223.353.000,00	72,05	312.242.500,00
4	BELANJA	25.534.588.180,00	22.476.423.832,00	88,02	18.178.511.353,00
5	BELANJA OPERASI	24.564.938.135,00	21.535.323.072,00	87,67	17.345.851.620,00
6	Belanja Pegawai	14.648.003.680,00	13.134.879.721,00	89,67	11.896.886.205,00
7	Belanja Barang dan Jasa	9.916.934.455,00	8.400.443.351,00	84,71	5.448.965.415,00
8	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BELANJA MODAL	969.650.045,00	941.100.760,00	97,06	832.659.733,00
10	Belanja Peralatan Dan Mesin	525.230.045,00	498.484.760,00	94,91	453.719.000,00
11	Belanja Bangunan Dan Gedung	444.420.000,00	442.616.000,00	99,59	378.940.733,00
12	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.224.588.180,00)	(22.253.070.832,00)	88,22	(17.866.268.853,00)
13	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.224.588.180,00)	(22.253.070.832,00)	88,22	(17.866.268.853,00)

Jambi, Maret 2019
PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. ARIANSYAH, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran E (Akuntansi dan Pelaporan) mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Barang pada OPD.

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

a. Pendapatan

Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.310.000.000,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 223.353.000,00 sehingga persentase realisasi pendapatan Tahun 2018 sebesar 72,05%.

b. Belanja

Belanja pada Tahun 2018 dengan jumlah anggaran Rp. 25.534.588.180,00,- sedangkan realisasi belanja adalah sebesar Rp. 22.476.423.832,00,- atau mencapai 88,02% dari total anggaran OPD.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun Anggaran 2018 mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.914.798.377,79 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 4.872.500,00 dan Aset Tetap sebesar Rp. 3.821.025.877,79 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 88.900.000,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 24.523.716,00 sedangkan jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.890.274.661,79 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 19.651.216,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 3.909.925.877,79 serta Ekuitas Dana cadangan adalah sebesar Rp. 0

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Dalam penyajian atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

Jambi, Maret 2019
PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. ARIANSYAH, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vii
NERACA.....	viii
BABI. PENDAHULUAN.....	1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	
KEUANGAN OPD	1
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN	
KEUANGAN OPD	2
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN	
KEUANGAN OPD	3
BAB II. EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD – OPD	4
2.1. EKONOMI MAKRO	4
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN	4
2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD – OPD	5
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	27
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ...	27
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM	
PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	27

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	31
4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN	
DAERAH	31
4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN	
LAPORAN KAUANGAN OPD	31
4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PEYUSUNAN	
LAPORAN KEUANGAN OPD	31
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN	
KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI	
PEMERINTAHAN	31
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	32
5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS	
LAPORAN KEUANGAN OPD	32
BAB VI. PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah ditetapkan.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi OPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.
- n. Surat Edaran Gubernur Jambi No. 300/5589/Keu Tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem, Kebijakan dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD - OPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD - OPD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada OPD

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan OPD
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Laporan Operasional (LO)
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas Dana

Bab VI. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD- OPD

2.1. Ekonomi Makro

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jambi yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar berbasis kompetensi daerah.
2. Pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan.
3. Pertumbuhan kawasan industri wilayah timur Provinsi Jambi.
4. Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar ekspor.
5. Penyederhanaan perizinan dalam pelayanan kepada pelaku usaha dibidang ekspor dan impor.
6. Mendukung pelaksanaan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
7. Mendorong peningkatan PAD Provinsi Jambi

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD - OPD

Pencapaian dan penyerapan realisasi anggaran OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang sumber pembiayaannya melalui APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. SEKRETARIAT/RUTIN

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 11 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 7 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Meubelur
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- g. Pengadaan Komputer

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Pembinaan Jasmani dan Rohani

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini terdiri dari 6 kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Aset
- c. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian
- d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- e. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
- f. Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 11 kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.1.621.230.900,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.546.053.617,- atau 95,36% dan fisik kegiatan 100%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.72.300.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.71.478.000,- atau 98,86% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya kegiatan pelayanan jasa surat menyurat sehingga memperlancar arus informasi kepada pihak lain.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.267.317.400,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.267.011.942,- atau 99,89% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah termanfaatkannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai penunjang kelancaran sarana di Dinas Perindag Provinsi Jambi.

- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.191.998.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.170.844.000,- atau 88,98% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pembayaran tenaga administrasi keuangan sehingga pelayanan administrasi keuangan berjalan lancar.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.113.356.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.113.348.175,- atau 99,99% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya jasa kebersihan kantor sehingga terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor.
- e. Penyediaan Alat Tulis kantor
Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.93.863.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.93.862.500,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya alat tulis kantor sehingga kelancaran kegiatan organisasi tercapai.
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.32.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.32.455.000,- atau 99,86% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan sehingga kelancaran kegiatan organisasi/kantor tercapai.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.68.902.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.53.638.000,- atau 77,85% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sehingga kelancaran sarana penerangan bangunan kantor tercapai.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.5.907.000,- atau 84,39% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.200.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.14.015.000,- atau 86,51% dan fisik kegiatan 100%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di perpustakaan sehingga meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur Dinas Perindag Provinsi Jambi.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.25.728.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.14.225.000,- atau 55,29% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya makanan dan minuman peserta rapat/pertemuan sebagai penunjang kelancaran rapat/pertemuan.

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.732.066.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.709.269.000,-atau 96,89% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sehingga terjalinnya sinergitasdan sinkronisasi tugas dengan pihak-pihak terkait.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.1.417.518.045.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.372.281.873,- atau 96,81% dan fisik kegiatan 100%.

Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.237.690.045,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.219.453.000,- atau 92,33% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya peralatan gedung kantor sehingga meningkatkan kelancaran, kenyamanan dan keamanan pegawai dalam melaksanakan kinerja (tupoksi).

b. Pengadaan Meubeleur

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.14.000.000,- atau 80,00% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya peralatan meubeleur sehingga meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.330.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.325.307.000,- atau 98,43% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terpeliharanya gedung kantor sehingga dapat menjaga keandalan gedung kantor beserta sarana dan prasarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.234.020.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.224.721.113,- atau 96,03% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional sehingga dapat digunakan secara optimal.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.104.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.101.526.000,- atau 97,62% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terpeliharanya peralatan elektronika sehingga dapat berfungsi secara optimal.

f. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.444.420.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.442.616.000,- atau 99,59% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya rehab dan penambahan ruang/gedung kantor sehingga berkurangnya kerusakagedung kantor.

g. Pengadaan Komputer.

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.49.388.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 44.658.760,- atau 90,42% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pengadaan peralatan komputer sehingga dengan sarana yang lengkapdapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.194.400.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.187.515.000,- atau 96,46% dan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.194.400.000,-dengan capaian realisasi keuangan sebesarRp.187.515.000,-atau 96,46% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannyasehingga meningkatkan penampilan dan motivasi kerja aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdiri dari 2 kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.58.130.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.51.584.000,- atau 88,74% dan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.20.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.18.800.000,- atau 94% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah diikutinya kegiatankursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur sehingga meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur Dinas Perindag Provinsi Jambi.

b. Pembinaan Jasmani dan Rohani

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.38.130.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.32.784.000,- atau 85,98% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan senam pagi bersama dan siraman rohanisehingga aparatur hidup lebih sehat dan bugar dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 566.489.675,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 529.937.516,- atau 93,55% dan fisik kegiatan 100,00%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.34.680.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.33.419.226,- atau 96,36% dan fisik kegiatan 100,00%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya laporan capaian kinerja program dan kegiatan dan diikutinya bimtek/diklat yang berkaitan dengan program dan kegiatan, sehingga tersedianyalaporan capaian kinerja program dan kegiatan sebagai bahan informasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Aset

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.67.875.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.65.733.500,- atau 96,84% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya Laporan Realisasi

Keuangan dan Aset dan diikutinya bimtek/diklat yang berkaitan dengan keuangan dan aset sehingga memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen keuangan dan aset Dinas Perindag Provinsi Jambi.

c. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.44.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.43.982.400,- atau 99,96% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya laporan pengelolaan kepegawaian dan diikutinya bimtek/diklat yang berkaitan dengan kepegawaian sehingga memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Jambi.

d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.211.815.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.208.444.770,- atau 98,41% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya rencana kerjadan terlaksananya rapat koordinasi program dan kegiatan tahunan sehingga terencanaanya program dan kegiatan dinas sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksi.

e. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.113.814.675,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.86.275.160- atau 75,80% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terutama yang pelaksanaan kegiatannya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

f. Pengembangan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.94.305.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesarRp.92.082.460,- atau 97,64% dan fisik kegiatan 100,00%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah terinformasinya data perkembangan dan kinerja industri dan perdagangan melalui web.

II. SEKTOR PERINDUSTRIAN

A. Program dan kegiatan

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah
- b. Kegiatan Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal
- c. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Kecil
- d. Kegiatan Pengembangan Rumah Tenun Jambi
- e. Kegiatan Pendataan IKM Se Provinsi Jambi
- f. Kegiatan Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi
- g. Kegiatan Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah
- h. Kegiatan Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil
- i. Kegiatan Konveksi Gugus Kendali Mutu Tingkat Provinsi

2. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Wira Usaha Baru Industri Kecil
- b. Kegiatan Pelatihan TOT bagi Para Aparat Pembina IKM
- c. Kegiatan Pengembangan One Village One Product (OVOP)

3. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini terdiri dari 5 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar
- b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar
- c. Kegiatan Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar
- d. Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar
- e. Kegiatan Updating Industri Menengah dan Besar Se Provinsi Jambi

4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Usaha Industri

5. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi.
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor
- c. Kegiatan Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi Yang Sudah Terakreditasi
- d. Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium
- e. Kegiatan Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB
- f. Kegiatan Survey IKM Atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 2.409.814.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.348.980.037,- atau 97,48% dan fisik kegiatan 100%. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 89.810.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 86.609.556,- atau 96,44% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan peningkatan SDM IKM berupa pelatihan manajemen dan cara berproduksi yang berorientasi pasar dan meningkatkan pengetahuan SDM IKM dalam pengolahan sehingga pengetahuan SDM IKM memiliki keragaman yang lain.

b. Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 809.845.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 807.046.359,- atau 99,65% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan promosi produk industri kecil sehingga dapat membantu perajin dalam memasarkan hasil industri kecil yang dibuat atau diproduksi.

c. Penguatan Kelembagaan Industri Kecil

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.294.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 49.793.400,- atau 99,00% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan kelembagaan usaha industri kecil berupa pemberian bantuan peralatan kepada pengusaha industri kecil sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produk IKM yang diberi bantuan.

d. Pengembangan Rumah Tenun Jambi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.225.300.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.210.000.000,- atau 93,21% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan pelatihan pembuatan tenun songket sehingga terciptanya perajin tenun songket yang memiliki skill dan kemampuan dalam menciptakan motif dan corak khas tersendiri.

e. Pendataan IKM Se-Provinsi Jambi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.79.080.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 79.054.000,- atau 99,97% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan pendataan IKM Kab/Kota se Provinsi Jambi sehingga terdapatnya data-data yang akurat sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan/keputusan.

f. Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 575.975.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 546.456.879,- atau 94,88% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan perajin unit promosi Jambi berupa rakor, festival dan lomba-lomba aneka kriya khas Jambi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan pengurus dan perajin dalam pengolahan usahanya.

g. Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.354.255.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.345.876.943,- atau 97,64% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pelatihan pewarnaan batik/songket Jambi dengan warna alam atau soft sehingga terciptanya pakaian batik dan songket Jambi dengan desain-desain modern.

h. Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.126.790.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 126.057.200,- atau 99,42% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil makanan di Kabupaten Tebo dan Kerinci.

i. Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Provinsi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.98.465.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 98.085.700,- atau 99,61% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan konvensi gugus kendali mutu tingkat Provinsi Jambi sehingga tersedianya tim GKM untuk konvensi GKM tingkat nasional .

2. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah

Program ini terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, masukan (input) dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 281.093.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.269.131.000,- atau 95,74% dengan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengembangan dan Pembinaan Wira Usaha Baru Industri Kecil

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.177.220.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 174.602.900,- atau 98,52% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan dalam bentuk pelatihan untuk IKM sehingga termotivasinya para IKM baru guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha.

b. Pelatihan TOT Bagi Para Aparat Pembina IKM

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.48.620.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 48.449.000,- atau 99,65% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) adalah terlaksananya Pelatihan TOT Bagi Para Aparat Pembina IKM Kabupaten/Kota sehingga meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparat agar mampu membina dan mengatasi kebutuhan IKM di lapangan.

c. Pengembangan One Village One Product (OVOP)

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.55.253.500,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 46.079.100,- atau 83,40% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan pengembangan OVOP sehingga meningkatkan pengetahuan dan wawasan perajin dalam pengembangan produk OVOP.

3. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini terdiri dari 5 (Lima) kegiatan, masukan (input) dana untuk program ini adalah sebesar Rp.1.772.814.820,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.745.733.751,- atau 42,06% dengan fisik kegiatan 43,73%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar.

Masukan (input) dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.130.627.320,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.128.197.500- atau 98,14% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) adalah terlaksananya pengawasan izin usaha SNI dan produk AMDK, minyak goreng dan kopi dalam Provinsi Jambi sehingga perusahaan/pelaku industri dapat menghasilkan produk yang bersih, higienis dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

b. Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar

Masukan (input) dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.997.645.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 0,- atau 0% dan fisik kegiatan 0%.Keluaran (output) adalah

belum terlaksananya kegiatan ini yang berupa pemberian bantuan mesin/peralatan karena pelaksanaannya di APBD Perubahan yang waktunya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan lelang.

c. Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.67.715.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.62.704.250,- atau 96,60% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya magang pelatihan hilirisasi karet, sawit dan industri agro ke luar daerah Provinsi Jambi sehingga meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta motivasi pelaku usaha industri menengah dan besar dan aparat pembina agar dapat mengembangkan produk yang ada di daerah.

d. Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.750.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.106.412.700,- atau 94,38% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya partisipasi pada pameran IMB bagi pelaku usaha industri berbasis agro menengah dan besar sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam memasarkan hasil produksinya sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat luas produk unggulan IMB yang ada di Provinsi Jambi.

e. Updating Industri Menengah dan Besar Se Provinsi Jambi

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.464.077.500,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.448.419.301,- atau 96,63% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya buku updating IMB se Provinsi Jambi berupa dokumen RIPIP (Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi) sehingga tersedianya informasi data industri agro kimia dan aneka menengah dan besar Provinsi Jambi.

4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Masukan (input) dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 734.557.060,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.574.034.978,- atau 78,15% dengan fisik kegiatan 80,94%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Peningkatan Pembinaan Usaha Industri

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.734.557.060,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.574.034.987,- atau 78,15% dan fisik kegiatan 80,94%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan mutu produk industri berbasis teknologi dan bantuan mesin kopi sehingga meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam peningkatan mutu produk industri berbasis teknologi dan mendapatkan inovasi dari bantuan mesin kopi tersebut.

2. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, masukan (input) dana untuk program ini adalah sebesar Rp.822.027.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.718.848.300,- atau 87,45% dengan fisik kegiatan 92,70%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi

Masukan (input) dan yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.400.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.94.298.000,- atau 98,84% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pemeliharaan dan penggantian suku cadang infrastruktur kelembagaan standarisasi sehingga meningkatnya kemampuan laboratorium dalam melakukan kalibrasi dan pengujian dan mengurangi ketidaksesuaian apabila dilakukan survalen oleh KAN serta terpeliharanya peralatan laboratorium.

b. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.227.950.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 161.232.800,- atau 70,73% dan fisik kegiatan 73,68%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan berupa survalen untuk laboratorium penguji dan kalibrasi guna mempertahankan akreditasi laboratorium dan pengambilan contoh barang SNI wajib di pasaran sehingga meningkatkan pelayanan jasa pengujian dan kalibrasi kepada customer dan terlatihnya petugas BPSMB dalam pengujian dan mengkalibrasi.

- c. Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang Sudah Terakreditasi
Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.53.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.53.200.000,- atau 99,44% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya Sosialisasi Lab. Kalibrasi yang sudah terakreditasi sehingga meningkatnya pelayanan lab. Kalibrasi, akreditasi, kepercayaan pelanggan dan PAD.
- d. Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium
Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.363.252.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.331.272.000,- atau 91,20% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium sehingga terpeliharanya alat-alat laboratorium sesuai standar yang ditetapkan secara internasional sehingga meningkatnya kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian dan kalibrasi dan meningkatnya pelayanan terhadap konsumen.
- e. Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB
Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.44.225.000,-dengan capaian realisasi keuangan Rp. 41.145.500,- atau 93,04% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pengiriman pegawai UPTD BPSMB untuk mengikuti diklat teknis Pengujian Mutu Barang sehingga meningkatnya kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh pegawai UPTD BPSMB.
- f. Survey IKM Atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian
Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 37.700.000,-dengan capaian realisasi keuangan Rp.37.700.000,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) terlaksananya kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada para pengguna jasa pelayanan UPTD BPSMB dalam melakukan kalibrasi dan pengujian sehingga dapat diketahuinya IKM di Provinsi Jambi terhadap pelayanan laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian.

III. SEKTOR PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Negeri

A. Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Secara keseluruhan program ini bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan pelaksanaan UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
- c. Kegiatan Monitoring Barang Yang Kadaluarsa di Pasaran.
- d. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- e. Kegiatan Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen.
- f. Kegiatan Identifikasi Tertib Niaga.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk mengefisiensi perdagangan dalam negeri sehingga antara produsen dengan konsumen sama-sama diuntungkan dan sama-sama terlindungi. Salah satu cara adalah dengan memperpendek distribusi atau memperlancar distribusi yang sudah ada.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang
- b. Kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
- c. Kegiatan Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal.
- d. Kegiatan Rantai Pasok dan Prognosa Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.865.320.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.830.765.481,- atau 96,01% dan fisik kegiatan 100%. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 206.320.000,- dengan realisasi keuangan Rp.198.754.200,- atau 96,33% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa sehingga berkurangnya peredaran barang yang tidak ber-SNI dan barang strategis yang tidak memenuhi ketentuan.

b. Pengembangan dan Pembinaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.323.726.981,- atau 92,49% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pembinaan dan terbentuknya BPSK di 3 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sehingga terselesaikannya sengketa konsumen dan terbinanya BPSK di 3 Kabupaten/Kota.

c. Monitoring Barang yang Kadaluarsa di Pasaran

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 73.775.000,- dengan realisasi keuangan Rp.73.775.000,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran sehingga berkurangnya peredaran barang atau produk yang sudah kadaluarsa atau tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan meningkatnya pemahaman pelaku usaha/pedagang tentang aturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 136.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp.136.024.500,-atau 99,80% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha perdagangan dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan kebijakan perlindungan konsumen.

e. Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesarRp. 7.575.000,- dengan realisasi keuanganRp.7.575.000,-atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh terlaksananya kegiatan survey IKM terhadap perlindungan konsumen sehingga diketahuinya IKM Provinsi Jambi terhadap perlindungan konsumen.

f. Identifikasi Tertib Niaga

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 91.350.000,- dengan realisasi keuanganRp. 90.909.800,-atau 99,52% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh terlaksananya kegiatan identifikasi tertib niaga sehingga teridentifikasinya jumlah perusahaan atau pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 861.900.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.838.128.600,- atau 97,24% dan fisik kegiatan 100%.Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 188.400.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 180.756.400,- atau 95,94% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperolehadalah terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM dan Sosialisasi Peraturan dan

kebijakan tentang pengawasan mutu bokar sehingga meningkatnya peluang dan daya saing pasar komoditi agro dan karet Jambi.

b. Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 323.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 318.058.600,- atau 98,47% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya Promosi dan Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri serta diikutinya pawai kendaraan hias, sehingga meningkatnya kecintaan atau penghargaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.

c. Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal.

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 43.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 42.293.200,- atau 97,67% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan sarana perdagangan dan pedagang kecil informal sehingga tersedianya data sarana perdagangan dan data pedagang kecil informal di 11 Kab/Kota se-Provinsi Jambi.

d. Rantai Pasok dan Prognosa Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 307.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 297.020.400,- atau 96,69% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap stok bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di tingkat distributor dan pasar tradisional di Jambi sehingga tersedianya data stok bahan pokok dan terpantaunya stok bahan pokok dan penyalurannya.

2. Perdagangan Luar Negeri

A. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini merupakan ujung tombak dalam rangka peningkatan kinerja ekspor Provinsi Jambi. Kegiatan ini difokuskan kepada bimbingan/petunjuk dalam pengisian dokumen yang menjadi salah satu syarat untuk melakukan kegiatan ekspor.

Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri.
- b. Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah.
- c. Kegiatan Pemutakhiran Data Eksportir dan Importir.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.179.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.178.156.458,- atau 99,25% dan fisik kegiatan 100%. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri
Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 27.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 27.500.000,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan SDM Perdagangan Luar Negeri terutama dalam peningkatan ekspor sehingga meningkatnya kemampuan para aparatur dapat menunjang pelaksanaan tugasnya di bidang perdagangan luar negeri.
- b. Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah
Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.97.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.95.738.855,- atau 98.70% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah dan forum konsultasi UKM calon eksportir, sehingga meningkatnya pengetahuan dan kinerja para eksportir dan aparat perdagangan luar negeri.

c. Kegiatan Pemutakhiran Data Eksportir dan Importir

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.54.917.603,- atau 99,85% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pendataan terhadap Eksportir dan Importir yang ada di Provinsi Jambi sehingga tersedianya data jumlah eksportir dan importir berupa buku Direktori Eksportir dan Importir.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.

3.1.2. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :

- a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dapat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
- b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
- d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
- e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja, input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi yang berbeda dengan rencana.

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka telah tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempedomani arah dan kebijakan umum APBD yang merupakan hasil kesepakatan dengan DPRD Provinsi dengan diikuti program strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang mendatang. Dokumen tersebut merupakan acuan untuk penyusunan anggaran dari masing-masing unit kerja pemerintah Provinsi yang disebut Rencana Kerja Anggaran SKPD(RKA-SKPD) yang akan dibahas lebih lanjut oleh panitia anggaran Pemprov dan panitia anggaran DPRD Provinsi Jambi. Hasil pembahasan dari tim panitia anggaran dimaksud, maka disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja tersebut.

3.2.2. Hambatan Dan Permasalahan

Selama tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya. Keberhasilan atau kegagalan sasaran pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi pada umumnya tidak banyak mengalami kegagalan, dan hal tersebut dapat dilihat pada tingkat pencapaian setiap program yang telah dilaksanakan pada umumnya telah mencapai 89%.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran konsumen untuk melindungi haknya sebagai konsumen.
2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha makanan untuk tidak menjual produk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen.
3. Rendahnya kemampuan SDM IKM terutama dalam kaitannya dengan kemampuan menangkap peluang usaha dan pasar, kejelian memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia serta

kemampuan mengikuti perkembangan dan menerapkan teknologi yang semakin efisien dan efektif.

4. Terbatasnya komoditi ekspor.
5. Terbatasnya kemampuan UKM dalam melakukan kegiatan ekspor.
6. Rendahnya daya saing produk ekspor.
7. Pemanfaatan teknologi tepat guna belum optimal.
8. Potensi industri belum tertata dengan optimal.
9. Penerapan SNI dalam rangka ekspor, impor maupun jaminan mutu produk yang beredar agar sesuai SNI belum berjalan optimal.
10. Sulitnya merencanakan waktu pelaksanaan karena dibatasi waktu dan ketentuan perencanaan, alokasi dana, disamping kesiapan kabupaten/kota.
11. Karena pelatihan membutuhkan instruktur/tenaga ahli dari luar Provinsi dikarenakan di dalam provinsi tidak tersedia sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan mereka.
12. Fluktuasi harga sembako dipasar terutama dihari-hari besar keagamaan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi kedepan, maka yang diperlukan antara lain :

1. Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan penegakan hukum tentang UU Perlindungan Konsumen.
2. Peningkatan SDM IKM.
3. Ketersediaan bahan baku produksi.
4. Ketersediaan teknologi proses produksi.
5. Peran aktif tenaga fungsional industri.
6. Kerjasama dalam pembinaan usaha industri dengan semua stake holder.
7. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Ekspor bagi IKM dan UMKM.
8. Peningkatan mutu komoditi ekspor.
9. Peningkatan SDM aparatur .
10. Keberadaan pasar lelang spot dan forward di tingkat desa.
11. Peningkatan peran UPTD BPSMB dalam rangka pengujian mutu dan penerapan SNI wajib.

12. Mengoptimalkan pengawasan dan koordinasi dengan BPOM Jambi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar.
13. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan dana yang dialokasikan dan terjadwal ke daerah sasaran.

Disamping itu pula pada sisi administrasi pencapaian dan penyerapan realisasi kegiatan ada beberapa hal yang juga perlu untuk dilaksanakan antara lain :

- a. Pengaturan jadwal kegiatan, perlu disesuaikan antara jumlah kegiatan atau tingkat kesulitan dalam kegiatan tersebut dengan waktu dan dana yang tersedia, sehingga tidak ada kegiatan yang dipaksakan harus selesai atau tidak dapat terlaksana.
- b. Perlu percepatan persiapan kegiatan yaitu pengambilan langkah antisipasi yang cepat dan tepat, terutama dalam proses pengadministrasian sebelum masuk tahap pelaksanaan.
- c. Bahwa setiap pengelola kegiatan sebaiknya mengetahui dan memahami betul core dari suatu kegiatan baik input, output dan outcomenya dan perlu diberikan asistensi khusus, mengenai apa yang perlu dilakukan dan yang menjadi kewajiban.
- d. Bahwa perlu dijadwalkan khusus pertemuan baik secara berkala maupun insidental dengan pengelola kegiatan, untuk mengevaluasi kinerja proyek setiap bulannya.
- e. Bahwa setiap kegiatan perlu dibuatkan laporannya, termasuk rapat/pertemuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- f. Bahwa setiap bidang dan sekretariat sebaiknya membuat laporan semester dan laporan tahunan, untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga memudahkan menyusun laporan tahunan, laporan akuntabilitas dan penyusunan rencana kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- g. Meningkatkan proyeksi (predictability) dan akuntabilitas (accountability).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah satuan kerja pada perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pada lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Pengukuran atas pos-pos yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pada lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan OPD telah mengacu kepada PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan OPD

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) atau dengan kata lain Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bakeuda selaku Bendahara Umum Daerah atau dengan kata lain belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

5.1.3. Pendapatan – LO (Laporan Operasional)

Pendapatan – LO adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Daerah.

Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5.1.4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumberdaya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset lainnya.

Pengukuran/penilaian aset :

1. Persediaan;

Persediaan disajikan sebesar :

) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksir pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4. Peralatan dan mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri meliputi

biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebagai biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

-) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
-) Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

-) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
-) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

5.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan

❖ Ringkasan Laporan

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 31 Desember 2018 terdiri dari Realisasi Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 223.353.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 22.476.423.832,- yang berupa Belanja Operasi sebesar Rp. 21.535.323.072,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 941.100.760,-.

B. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/Defisit Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas awal sebesar Rp. 13.185.209.617,19 (tiga belas milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas koma sembilan belas rupiah) yang merupakan jumlah ekuitas dana tahun 2017 dan saldo awal Tahun 2018.
2. Surplus / defisit LO sebesar Rp. 22.467.801.580,09 (dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu lima ratus delapan puluh koma nol sembilan rupiah) merupakan selisih yang akan mengurangi jumlah ekuitas.
3. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp. 576.053.825,93 yang merupakan koreksi atas pembetulan terhadap kesalahan

pencatatan akuntansi sehingga akun/pos yang disajikan sesuai dengan yang seharusnya.

4. Ekuitas Akhir merupakan selisih antara Ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Koreksi ekuitas lainnya dengan rincian :

Ekuitas awalRp.13.185.209.617,09

Defisit - LORp.22.467.801.580,09

KoreksiRp.576.053.825,93

Rp.23.043.855.406,02

Kewajiban (Rp. 40.119.339.685,00)

(Rp. 17.075.484.278,98)

Ekuitas akhir..... **Rp. 3.890.274.661,79**

C. Neraca

Posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang tercermin dalam Neraca periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Jumlah Aset sebesar Rp. 3.914.798.377,79 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 4.872.500,00 Aset tetap sebesar Rp. 3.821.025.877,79 Dana Cadangan sebesar Rp. 0,- dan Aset lainnya sebesar Rp. 88.900.000,00.

Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 24.523.716,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 24.523.716,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 3.890.274.661,79 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.19.651.216,00 Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 3.909.925.877,79 Ekuitas Dana Cadangan sebesar Rp. 0 dan Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 0.

❖ Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran :

A. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah (Laboratorium UPTD BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama periode ini adalah sebesar

Rp.223.353.000,- terdapat penurunan target sebesar Rp. 86.647.000,- dari target telah ditetapkan sebesar Rp. 310.000.000,-

B. Belanja

Realisasi Belanja

Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, masing-masing bagian belanja tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Anggaran dan realisasi masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, **disajikan dalam lampiran mengenai Laporan Realisasi Anggaran.**

Dalam catatan atas laporan keuangan ini, disajikan informasi rincian pos belanja sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Belanja dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Belanja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dari Tabel-tabel berikut ini :

TABEL 1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran murni	Anggaran setelah perubahan	Realisasi belanja	Presentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
APBD	12.605.000.000,-	11.784.795.000,-	10.191.150.611,-	86,48%
Pinjaman lain	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-
Rupiah murni				
Pendamping	-	-	-	-

PNBP	-	-	-	-
JUMLAH		11.784.795.000,-	10.191.150.611,-	86,48%

TABEL 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

Nomor Urut	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1	Belanja	25.534.588.180,-	22.476.423.832,-
1.1	Belanja operasi	24.564.938.135,-	21.535.323.072,-
1.1.1	Belanja pegawai	14.648.003.680,-	13.134.879.721,-
1.1.2	Belanja barang dan jasa	9.916.934.455,-	8.400.443.351,-
1.2	Belanja modal	969.650.045,-	941.100.760,-
1.2.1	Belanja Peralatan dan mesin	525.230.045,-	498.484.760,-
1.2.2	Belanja bangunan dan gedung	444.420.000,-	442.616.000,-
1.2.3	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	0,-	0,-
Jumlah		25.534.588.180,-	22.476.423.832,-

TABEL 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Pegawai	13.749.793.180	12.285.273.221	89,35
Belanja Gaji dan Tunjangan	9.066.929.148	7.896.575.212	87,09
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.039.667.409	6.178.135.400	87,76
Tunjangan Keluarga	657.123.881	587.449.688	89,40
Tunjangan Jabatan	279.587.025	269.405.000	96,36
Tunjangan Fungsional	124.707.009	85.060.000	68,21
Tunjangan Fungsional Umum	251.710.713	226.620.000	90,03
Tunjangan Beras	363.387.990	310.754.220	85,52
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.771.983	5.020.039	6,14
Pembulatan Gaji	93.142	78.244	84,01
Iuran Asuransi Kesehatan	206.449.239	173.994.723	84,28
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	15.083.724	12.710.865	84,27
Belanja Jaminan Kematian	47.347.033	47.347.033	100,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.682.864.032	4.388.698.009	93,72
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.682.864.032	4.388.698.009	93,72

1) Belanja Tidak Langsung

Terdiri dari Belanja pegawai yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

2) Belanja Langsung

(1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pembayaran honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

(2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk biaya rutinitas perkantoran yang berkaitan dengan barang/jasa, seperti pembelian bahan pakai habis kantor, biaya jasa kantor, biaya perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa rumah/gedung/gudang/parkir, biaya makan dan minuman, biaya pakaian dinas dan atributnya, biaya pakaian khusus hari-hari tertentu dan biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dimasukkan dalam kelompok ini.

(3) Belanja Modal, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset SKPD) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Output atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas dan diinvestasikan yang tercatat dalam neraca SKPD.

(4) Ringkasan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dalam APBD Tahun 2018 dikelompokkan dalam belanja langsung adalah sebagai berikut :

TABEL 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Belanja langsung	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
Belanja pegawai			
Honorarium PNS	215.610.500,-	194.706.500,-	90,30
Honorarium non PNS	682.600.000,-	654.900.000,-	95,94
Uang lembur	0,-	0,-	0,00
Belanja barang dan jasa			
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	629.841.000,-	599.338.175,-	95,15
Belanja Bahan/Material	453.350.680,-	435.800.000,-	96,12
Belanja Jasa Kantor	976.301.280,-	913.223.822,-	93,53
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.620.000,-	73.332.113,-	88,75
Belanja Cetak Dan Penggandaan	304.472.500,-	297.017.500,-	97,55
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	329.400.000,-	320.917.000,-	97,42
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.400.000,-	28.380.000,-	82,50
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Per.Kantor	59.000.000,-	42.000.000,-	71,18
Belanja Makan Dan Minum	353.302.000,-	324.665.500,-	91,89
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	97.200.000,-	93.960.000,-	96,66
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	110.700.000,-	107.460.000,-	97,07
Belanja Perjalanan Dinas	3.240.480.195,-	3.012.563.535,-	92,96
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	54.000.000,-	52.790.250,-	97,75
Belanja Pemeliharaan	377.500.000,-	369.833.000,-	97,96
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.390.445.000,-	399.824.918,-	28,75
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	315.030.000,-	297.930.000,-	94,57
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,-	15.000.000,-	100,00
Belanja Transortasi dan Akomodasi Peserta	1.093.891.800,-	1.010.134.358,-	92,34
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin – Pengadaan Mesin hitung/jumlah	10.000.000,-	9.900.000,-	99,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor Lainnya	162.555.445,-	149.513.000,-	91,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pembersih	2.524.600,-	1.800.000,-	71,30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin	55.610.000,-	53.690.000,-	96,55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan System/Power Supply	7.000.000,-	4.550.000,-	65,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair	17,500.000,-	14.000.000,-	80,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer	41.588.000,-	41.058.760,-	98,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.800.000,-	3.600.000,-	46,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung kantor	444.420.000,-	442.616.000,-	99,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – pengadaan Alat Ukur Lainny	24.200.000,-	24.078.000,-	99,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Humidity Control	196.452.000,-	196.295.000,-	99,92

Tabel 5
Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode Rekening	Uraian Belanja modal (BM)	Setelah Perubahan	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1.3.1	BM Tanah	-	-
1.3.2	BM PERALATAN DAN MESIN		
1.3.3	BM ALAT BENGKEL & ALAT UKUR		
	Belanja Modal Pengadaan Thermocouple Probe	6.077.500	6.077.500
	Belanja Modal Pengadaan Digital Contact Thermometer	7.183.000	7.183.000
	Belanja Modal Pengadaan Digital Caliper	3.420.000	3.420.000
	Belanja Modal Pengadaan Thermocouple Welder	7.397.500	7.397.500
1.3.4	BM ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	9.900.000	9.900.000
	Belanja Modal Pengadaan LED Display	15.000.000	15.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	1.800.000	1.800.000
	Belanja Modal Pengadaan AC Split	18.600.000	18.600.000
	Belanja Modal Pengadaan AC Standing Floor	27.500.000	27.500.000
	Belanja Modal Pengadaan UPS	4.550.000	4.550.000
	Belanja Modal Pengadaan Sofa	14.0000.0000	14.0000.0000
	Belanja Modal Pengadaan Hordeng	103.013.0000	103.013.0000
	Belanja Modal Pengadaan Laptop	12.068.760	12.068.760

	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	28.990.000	28.990.000
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pendingin/Kulkas	7.590.000	7.590.000
	Belanja Modal Pengadaan Televisi	9.600.000	9.600.000
	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	8.500.000	8.500.000
	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.600.000	3.600.000
1.3.5	BM ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI		
1.3.6	BM ALAT LABORATORIUM		
	Belanja Modal Pengadaan Humidity Calibrator	196.295.000	196.295.000
1.3.7	BM KEAMANAN		
	Belanja Modal Pengadaan CCTV	13.400.000	13.400.000
1.3.3	BM Gedung Dan Bangunan		
	Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan UTPD BPSMB	29.953.000	29.953.000
	Pekerjaan Perbaikan Atap dan Plapon Gedung Kantor Disperindag	114.710.000	114.710.000
	Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB	49.826.000	49.826.000
	Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Rehab Gedung	17.780.000	17.780.000
	Pekerjaan Lantai Selasar Gedung Kantor Disperindag	49.531.000	49.531.000
	Pekerjaan Pembuatan Pintu Ruangan Laboratorium UPTD BPSMB	44.467.000	44.467.000
	Pekerjaan Atap dan Plapon UPTD BPSMB	99.335.000	99.335.000
	Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.120.000	7.120.000
	Pekerjaan Ruang Customer Service UPTD BPSMB	29.894.000	29.894.000
1.3.4	BM Jalan,Irigasi, Dan Instalasi	-	-
	Belanja Modal Pengadaan	-	-
	Konstruksi Jaringan Air Bersih	-	-
1.3.5	BM Aset Tetap Lainnya	-	-
	Belanja Modal Pengadaan	-	-
	Buku/Kepustakaan	-	-
	Belanja Modal Pengadaan	-	-
	Barang Bercorak Kesenian	-	-
	Kebudayaan	-	-
1.3.6	BM Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-

1.3.1 Tanah

Jumlah nilai tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,- terdiri dari :

- Nilai tanah per 31 Desember 2017 Rp. 0,-

- Mutasi tahun 2018	<u>Rp. 0,-</u>
Nilai tanah per 31 Desember 2018	Rp. 0,-
Nilai tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- merupakan total nilai tanah, terdiri dari :	
- Tanah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 0,-

1.3.2. Peralatan dan Mesin

Jumlah nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp.12.543.043.015,32 terdiri dari :

- Nilai Peralatan &Mesin per 31-12- 2017	Rp. 12.898.073.849,98
- Mutasi tahun 2018 (bertambah)	Rp. 498.484.760,00
- Mutasi tahun 2018 (berkurang)	<u>Rp. 853.515.594,00</u>
Nilai Peralatan &Mesin per 31-12-2018	Rp. 12.543.043.015,32

1.3.3 Gedung dan Bangunan

Jumlah nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesarRp.4.303.151.453,00 terdiri dari :

- Nilai Bangunan dan Gedung per 31-12-2017	Rp 4.892.886.953,00
- Mutasi tahun 2018 (bertambah)	Rp. 442.616.000,00
- Mutasi tahun 2018 (berkurang)	<u>Rp. 1.032.351.500,00</u>
Nilai Bangunan dan Gedung per31-12-2018	Rp. 4.303.151.453,00

1.3.4 Jalan,Irigasi, dan Jaringan

Jumlah nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.129.212.000,- nihil tersebut :

- Nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31-12-2017	Rp.129.212.000,-
- Mutasi tahun 2018	<u>Rp. 0,-</u>
Nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31-12-2018	Rp.129.212.000,-

1.3.5 Aset Lain-lain

Jumlah nilai aset lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.88.900.000,00 terdiri dari :

- Nilai aset lain-lain per 31-12-2017	Rp.88.900.000,00
- Mutasi tahun 2018	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai aset lain-lain per 31-12-2018	Rp.88.900.000,00

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.nihil merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan untuk perolehan aset tetap berupa jembatan, jalan dan bangunan gedung yang sampai dengan 31 Desember 2018.

❖ Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

➤ Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran yang terdiri dari:

- Saldo kas di bendahara per 31-12-2017 Rp. 0,-
- Saldo kas di bendahara per 31-12-2018 Rp. 0,-

➤ Aset Tetap

Aset tetap adalah aset terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 17.002.406.468,32 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Aset Tetap

Nama Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	12.898.073.849,98	498.484.760,00	853.515.594,66	12.543.043.015,32
Gedung dan Bangunan	4.892.886.953,00	442.616.000,00	1.032.351.500,00	4.303.151.453,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.212.000,00	-	-	129.212.000,00
Aset Lainnya	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00
Jumlah	17.947.172.802,98	941.100.760,00	1.885.867.094,66	17.002.406.468,32

Catatan :

1. Melakukan Mutasi keluar aset tetap akun peralatan dan mesin UPTD Metrologi ke Kota Jambi sebesar Rp.853.515.594,66

2. Melakukan Mutasi keluar aset akun gedung dan bangunan UPTD Metrologi ke Kota Jambi sebesar Rp. 1.032.351.500,00

➤ Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek, yang terdiri atas :

- Cadangan Piutang Rp. 0,-
- Cadangan Persediaan Rp. 4.872.500,-

❖ Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama periode pelaporan seperti :

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau diserap yaitu:

1. Adanya Kelebihan sisa kontrak yang tidak dapat diserap pada beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa.
2. Adanya Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk dilaksanakan lelang.
3. Adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah di UPTD BPSMB karena yang biasanya kalau mau mengekspor produk pinang harus melalui uji sertifikasi sekarang tidak diharuskan lagi

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan penting bahwa :

) Pada Laporan Realisasi Anggaran : Dari target pendapatan yang ditetapkan Tahun 2018 sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 223.353.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau 72,05% dan pada sisi belanja dianggarkan sebesar Rp. 25.534.588.180,00 (dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 22.476.423.832,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau 88,02% terdapat inefisiensi anggaran sebesar 15,97% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

) Laporan Operasional (LO) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tercantum ada Pendapatan – LO sebesar Rp. 223.353.000,00 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp. 223.353.000,00 yang berupa :

- Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp. 223.353.000,00

sedangkan Beban – LO sebesar Rp. 22.691.154.580,09

terdiri dari :

- Beban Pegawai - LO sebesar Rp. 12.285.273.221,00
- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.9.303.515.950,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.102.365.409,09

Sehingga terdapat selisih atau Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. 22.467.801.580,09,-

) Dalam Neraca : Posisi Aset pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 3.914.798.377,79 (tiga milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan rupiah) bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp.4.693.161.102,81 (empat milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua koma delapan puluh satu rupiah) terdapat penurunan sebesar Rp.778.362.725,02 atau (16,59 %)

) Selama Tahun 2018 terdapat Kewajiban sebesar 24.523.716,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 3.890.274.661,79 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah).

Jambi, Maret 2019
PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. ARIANSYAH, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2018			REALISASI 2017
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	PENDAPATAN	310.000.000,00	223.353.000,00	72,05	312.242.500,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	310.000.000,00	223.353.000,00	72,05	312.242.500,00
3	Pendapatan Retribusi Daerah	310.000.000,00	223.353.000,00	72,05	312.242.500,00
4	BELANJA	25.534.588.180,00	22.476.423.832,00	88,02	18.178.511.353,00
5	BELANJA OPERASI	24.564.938.135,00	21.535.323.072,00	87,67	17.345.851.620,00
6	Belanja Pegawai	14.648.003.680,00	13.134.879.721,00	89,67	11.896.886.205,00
7	Belanja Barang dan Jasa	9.916.934.455,00	8.400.443.351,00	84,71	5.448.965.415,00
8	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BELANJA MODAL	969.650.045,00	941.100.760,00	97,06	832.659.733,00
10	Belanja Peralatan Dan Mesin	525.230.045,00	498.484.760,00	94,91	453.719.000,00
11	Belanja Bangunan Dan Gedung	444.420.000,00	442.616.000,00	99,59	378.940.733,00
12	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.224.588.180,00)	(22.253.070.832,00)	88,22	(17.866.268.853,00)
13	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.224.588.180,00)	(22.253.070.832,00)	88,22	(17.866.268.853,00)

Jambi, Maret 2019
PENGUNA ANGGARAN,


Drs. ARIANSYAH, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KD. REK	URAIAN	2018	2017
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas	0,00	0,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	0,00	0,00
1.1.4	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.5	Persediaan	4.872.500,00	45.916.750,00
1.1.6	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
1.1.7	Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	4.872.500,00	45.916.750,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	0,00	0,00
1.2.3	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	0,00	0,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	12.543.043.015,32	12.898.073.849,98
1.3.3	Gedung dan Bangunan	4.303.151.453,00	4.892.886.953,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	129.212.000,00	129.212.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(13.181.380.590,53)	(13.388.828.450,17)
	JUMLAH ASET TETAP	3.821.025.877,79	4.558.344.352,81
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5	Aset Lain-lain	88.900.000,00	88.900.000,00
1.5.6	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	88.900.000,00	88.900.000,00
	JUMLAH ASET	3.914.798.377,79	4.693.161.102,81
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
2.1.9	Utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00
2.1.10	Utang Belanja Jasa Kantor	24.523.716,00	12.101.867,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24.523.716,00	12.101.867,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	24.523.716,00	12.101.867,00
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	0,00	0,00
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	4.872.500,00	45.916.750,00

Urusan Pemerintahan : 3 . 07

Urusan Pilihan Perindustrian

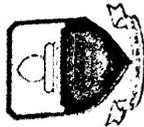
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KD. REK	URAIAN	2018	2017
3 . 1 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(24.523.716,00)	(12.101.867,00)
3 . 1 . 5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
3 . 1 . 6	Cadangan Biaya dibayar dimuka	0,00	0,00
3 . 1 . 7	Cadangan Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	(19.651.216,00)	33.814.883,00
3 . 2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3 . 2 . 1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.821.025.877,79	4.558.344.352,81
3 . 2 . 3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	88.900.000,00	88.900.000,00
3 . 2 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	3.909.925.877,79	4.647.244.352,81
3 . 3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3 . 3 . 1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
3 . 4	KOREKSI EKUITAS		
3 . 4 . 1	Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.890.274.661,79	4.681.059.235,81
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.914.798.377,79	4.693.161.102,81



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

s.d 31 Desember 2018

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3.07 Perindustrian
Unit Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN	310.000.000,00	223.353.000,00	(86.647.000,00)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	310.000.000,00	223.353.000,00	(86.647.000,00)
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	310.000.000,00	223.353.000,00	(86.647.000,00)
2	BELANJA	25.534.588.180,00	22.476.423.832,00	(3.058.164.348,00)
2.1	BELANJA OPERASI	24.564.938.135,00	21.535.323.072,00	(3.029.615.063,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	14.648.003.680,00	13.134.879.721,00	(1.513.123.959,00)
2.1.1.2	Belanja Barang	9.916.934.455,00	8.400.443.351,00	(1.516.491.104,00)
2.2	BELANJA MODAL	969.650.045,00	941.100.760,00	(28.549.285,00)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	525.230.045,00	498.484.760,00	(26.745.285,00)
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	444.420.000,00	442.616.000,00	(1.804.000,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.224.588.180,00)	(22.253.070.832,00)	2.971.517.348,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.224.588.180,00)	(22.253.070.832,00)	2.971.517.348,00

Jambi, 1 Januari 2018
Pengguna Anggaran

Drs. Ariansyah, ME
NIP. 197206301993021001



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 3 Unusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3.07 Perindustrian Unit Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		URAIAN			
NO. URUT	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)	
8	223.353.000,00	312.242.500,00	(88.889.500,00)	(28,47)	
8.1	223.353.000,00	312.242.500,00	(88.889.500,00)	(28,47)	
8.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2	223.353.000,00	312.242.500,00	(88.889.500,00)	(28,47)	
8.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	22.691.154.580,09	18.699.271.531,71	3.991.883.048,38	21,35	
9.1	22.691.154.580,09	18.699.271.531,71	3.991.883.048,38	21,35	
9.1.1	12.285.273.221,00	11.057.537.205,00	1.227.736.016,00	11,10	
9.1.2	9.303.515.950,00	6.202.935.444,00	3.100.580.506,00	49,99	
9.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
 Bidang Pemerintahan : 3.07 Perindustrian
 Unit Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.5	Beban Hibah	0,00	146.018.000,00	(146.018.000,00)	(100,00)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.102.365.409,09	1.292.780.882,71	(190.415.473,62)	(14,73)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.10	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
		(22.467.801.580,09)	(18.387.029.031,71)	(4.080.772.548,38)	22,19
		(44.935.603.160,18)	(36.774.058.063,42)	(8.161.545.096,76)	22,19
		SURPLUS/DEFISIT-LO			
		SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI			

Jambi, 1 Januari 2018
 Pengguna Anggaran

Drs. Ariansyah, ME

NIP. 197206301993021001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 07	Perindustrian
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	(13.185.209.617,19)	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22.467.801.580,09)	(18.387.029.031,71)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	(1.885.867.094,66)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.309.813.268,73	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	40.119.339.685,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.890.274.661,79	(18.387.029.031,71)

Jambi, 1 Januari 2018

Pengguna Anggaran

Drs. Ariansyah, ME

NIP. 197206301993021001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 07		Urusan Pilihan Perindustrian	
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
KD. REK	URAIAN	2018	2017
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas	0,00	0,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	0,00	0,00
1.1.4	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.5	Persediaan	4.872.500,00	45.916.750,00
1.1.6	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
1.1.7	Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	4.872.500,00	45.916.750,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	0,00	0,00
1.2.3	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	0,00	0,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	12.543.043.015,32	12.898.073.849,98
1.3.3	Gedung dan Bangunan	4.303.151.453,00	4.892.886.953,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	129.212.000,00	129.212.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(13.181.380.590,53)	(13.388.828.450,17)
	JUMLAH ASET TETAP	3.821.025.877,79	4.558.344.352,81
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5	Aset Lain-lain	88.900.000,00	88.900.000,00
1.5.6	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	88.900.000,00	88.900.000,00
	JUMLAH ASET	3.914.798.377,79	4.693.161.102,81
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
2.1.9	Utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00
2.1.10	Utang Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24.523.716,00	12.101.867,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	24.523.716,00	12.101.867,00
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KD. REK	URAIAN	2018	2017
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	24.523.716,00	12.101.867,00
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	0,00	0,00
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	4.872.500,00	45.916.750,00
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(24.523.716,00)	(12.101.867,00)
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
3.1.6	Cadangan Biaya dibayar dimuka	0,00	0,00
3.1.7	Cadangan Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	(19.651.216,00)	33.814.883,00
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.821.025.877,79	4.558.344.352,81
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	88.900.000,00	88.900.000,00
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	3.909.925.877,79	4.647.244.352,81
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
3.4	KOREKSI EKUITAS		
3.4.1	Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.890.274.661,79	4.681.059.235,81
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.914.798.377,79	4.693.161.102,81

TABEL 4

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Belanja langsung	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
Belanja pegawai			
Honorarium PNS	215.610.500,-	194.706.500,-	90,30
Honorarium non PNS	682.600.000,-	654.900.000,-	95,94
Uang lembur	0,-	0,-	0,00
Belanja barang dan jasa			
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	629.841.000,-	599.338.175,-	95,15
Belanja Bahan/Material	453.350.680,-	435.800.000,-	96,12
Belanja Jasa Kantor	976.301.280,-	913.223.822,-	93,53
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.620.000,-	73.332.113,-	88,75
Belanja Cetak Dan Penggandaan	304.472.500,-	297.017.500,-	97,55
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	329.400.000,-	320.917.000,-	97,42
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.400.000,-	28.380.000,-	82,50
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Per.Kantor	59.000.000,-	42.000.000,-	71,18
Belanja Makan Dan Minum	353.302.000,-	324.665.500,-	91,89
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	97.200.000,-	93.960.000,-	96,66
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	110.700.000,-	107.460.000,-	97,07
Belanja Perjalanan Dinas	3.240.480.195,-	3.012.563.535,-	92,96
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	54.000.000,-	52.790.250,-	97,75
Belanja Pemeliharaan	377.500.000,-	369.833.000,-	97,96
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.390.445.000,-	399.824.918,-	28,75
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	315.030.000,-	297.930.000,-	94,57
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,-	15.000.000,-	100,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	1.093.891.800,-	1.010.134.358,-	92,34
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin – Pengadaan Mesin hitung/jumlah	10.000.000,-	9.900.000,-	99,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor Lainnya	162.555.445,-	149.513.000,-	91,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pembersih	2.524.600,-	1.800.000,-	71,30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin	55.610.000,-	53.690.000,-	96,55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan System/Power Supply	7.000.000,-	4.550.000,-	65,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair	17,500.000,-	14.000.000,-	80,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer	41.588.000,-	41.058.760,-	98,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.800.000,-	3.600.000,-	46,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung kantor	444.420.000,-	442.616.000,-	99,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – pengadaan Alat Ukur Lainny	24.200.000,-	24.078.000,-	99,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Humidity Control	196.452.000,-	196.295.000,-	99,92

Tabel 5
Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode Rekening	Uraian Belanja modal (BM)	Setelah Perubahan	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1.3.1	BM Tanah	-	-
1.3.2	BM PERALATAN DAN MESIN		
1.3.3	BM ALAT BENGKEL & ALAT UKUR		
	Belanja Modal Pengadaan Thermocouple Probe	6.077.500	6.077.500
	Belanja Modal Pengadaan Digital Contact Thermometer	7.183.000	7.183.000
	Belanja Modal Pengadaan Digital Caliper	3.420.000	3.420.000
	Belanja Modal Pengadaan Thermocouple Welder	7.397.500	7.397.500
1.3.4	BM ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	9.900.000	9.900.000
	Belanja Modal Pengadaan LED Display	15.000.000	15.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	1.800.000	1.800.000
	Belanja Modal Pengadaan AC Split	18.600.000	18.600.000
	Belanja Modal Pengadaan AC Standing Floor	27.500.000	27.500.000
	Belanja Modal Pengadaan UPS	4.550.000	4.550.000
	Belanja Modal Pengadaan Sofa	14.0000.0000	14.0000.0000
	Belanja Modal Pengadaan Hordeng	103.013.0000	103.013.0000
	Belanja Modal Pengadaan Laptop	12.068.760	12.068.760
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	28.990.000	28.990.000
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pendingin/Kulkas	7.590.000	7.590.000
	Belanja Modal Pengadaan Televisi	9.600.000	9.600.000
	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	8.500.000	8.500.000
	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.600.000	3.600.000